



Pengantar:

Dr. Irwansyah, M.A.

Dr. Ahmad Mulyana, M.Si.

THE REPOTITION OF COMMUNICATION IN THE DYNAMIC OF CONVERGENCE

Reposisi Komunikasi
dalam Dinamika Konvergensi



Editor:

Dra. Diah Wardhani, M.Si.

Afdal Makkuraga Putra, M.M., M.Si.

Perkembangan teknologi masa kini menciptakan media komunikasi baru (*new media*) yang memiliki sifat konvergensi (diperantarai/*mediated communications*) yakni komunikasi digital elektronik yang menggunakan jaringan (*network*). Komunikasi baru (*new media*) sesungguhnya tidak terbatas pada internet atau teknologinya semata, tetapi sangat luas—meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, seni, budaya, pendidikan, militer, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan betapa luas cakupan serta konteks dan dampak perubahan media baru dalam kehidupan manusia dewasa ini.

Buku ini mampu menguraikan dinamika teknologi komunikasi yang terus-menerus terjadi secara cepat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ide, pemikiran, kajian, dan hasil penelitian yang dituangkan di dalam buku ini diharapkan bisa menginspirasi serta mengawali temuan teori-teori baru yang mampu menjawab fenomena perkembangan teknologi komunikasi yang aktual.

T I M P E N U L I S

Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M.
Prida Ariani Ambar Astuti, S.Sos., M.Si.
Yusuf Gala

Dr. Eko Harry Susanto, M.Si.
Heri Budianto, M.Si.
Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H.
Rose Emmaria Tarigan
Cici Eka Iswahyuningtyas, M.Soc.Sc.
Retno Noviani

Yuniar Fitriyandani
Deviani Setyorini, S.Sos., M.Sc.
Mufti Nurlatifah

Dr. Mulharnetti Syas
Leonita K. Syarief, S.Sos.
Agus Triyono
Reuben Reynold Sihite
Morissan, M.A.

Wahyutama, M.Si.
Dr. Atwar Bajari, M.Si.

Dr. Endah Murwani
Yearry Panji Setianto, M.Si.
Dr. Farid Hamid U., S.Sos., M.Si.
Atmadji Sumarkidjo, M.M.

Ellen Miansky Yazak
Alila Pramiyanti
Dra. Kiki Zakiah, M.Si.
Adi Bajuri
Ekky Imanjaya

Ezmieralda Melissa
Wegig Murwonugroho, S.Sn., M.Hum.

R. Masri Sareb Putra
Endri Listiani, S.IP., M.Si.
Yustikasari, S.Sos., M.I.Kom
Feni Fasta, S.E., M.Si.
Christina Arsi, S.Ikom.

Melly Ridaryanthi
Susri Adeni
Tri Diah Cahyowati, M.Si.
Bintang Handayani, M.Si., M.B.A.
Arief Fajar

Eli Jamilah Mihardja, M.Si.
Wahyu Widiastuti, S.Sos., M.Sc.
Novi Erlita, S.Sos., M.A.
Andi Fahrudin

Astrie Krisnawati, S.Sos., M.Si.
Fajar Junaedi, M.Si.
Helpris Estaswara
Reynaldo Harahap

Irwa R. Zarkasi
S. Kunto Adi Wibowo
Fiona Suwana
R. Nia Kania Kurniawati, S.IP., M.Si.
Rita Destiwati, S.S., M.Si.
Junardi Harahap, S.Sos., M.Si.
Setio Budi, H.H., M.Si.
Suryaning Hayati, S.E., M.M.



KENCANA
PRENADA MEDIA GROUP
E-mail: pmg@prenadamedia.com
http: www.prenadamedia.com

ISBN: 978-602-9413-00-7

Pengantar:

Dr. Irwansyah, M.A.

Dr. Ahmad Mulyana, M.Si.

THE REPOTITION OF COMMUNICATION IN THE DYNAMIC OF CONVERGENCE

Reposisi Komunikasi
dalam Dinamika Konvergensi



Editor:

Dra. Diah Wardhani, M.Si.

Afdal Makkuraga Putra, M.M., M.Si.

tensi sehingga memungkinkan sumber daya komunikasi bersifat *multitasking* yang memenuhi ciri efektif dan efisien industri. Suryaning Hayati, S.E., M.M. mengangap perlunya pembelajaran mengenai etika untuk pendidikan komunikasi sebagai landasan utama dalam menjalankan profesi komunikasi di masyarakat.

Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi bagi para pemakalah untuk berpartisipasi dalam seminar dan berkenan untuk memublikasi materi sebagai sumbang ide, pemikiran bagi perkembangan ilmu komunikasi. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Universitas Mercu Buana yang telah memberikan kesempatan bagi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana atas dukungan sepenuhnya dalam acara ini.

Jakarta, Mei 2011

Editor

DAFTAR ISI

PENGANTAR:

Dr. Irwansyah, M.A. v

Dr. Ahmad Mulyana, M.Si. xvii

KATA PENGANTAR xxvii

DAFTAR ISI xxxv

BAGIAN 1: PELUANG ENTREPRENEUR DAN NEW ADVERTISING DALAM NEW MEDIA

The Relationship of Social Network and Entrepreneurship Education
Towards Student Intention for Being Entrepreneur 2

Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, M.M.

Conversations di New Media sebagai Upaya Mencapai
Keberhasilan Periklanan 13

Prida Ariani Ambar Astuti, S.Sos., M.Si.

Small Business Advertising Agency: Peluang Bisnis di Dunia Kreatif... 30

Yusuf Gala

BAGIAN 2: MEDIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Eksistensi Media dalam Pemberantasan Korupsi..... 46

Dr. Eko Harry Susanto, M.Si.

Media Massa: Perang Melawan Korupsi
dan Penguatan Integritas 65

Heri Budianto, M.Si.

Integritas Hakim Agung dalam Memutuskan
Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 82

Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H.

Media dan Pemberantasan Korupsi..... 97

Rose Emmaria Tarigan

Antara Pornografi dan Kreativitas: Pandangan LSF Mengenai Sensor Film Pasca-Soeharto	112
<i>Cici Eka Iswahyuningtyas, M.Soc.Sc.</i>	
<i>Retno Noviani</i>	
<i>Yuniar Fitriyandani</i>	
Censorship and Government Regulation	129
<i>Deviani Setyorini, S.Sos., M.Sc.</i>	
Menilik Aturan Jurnalisme Online sebagai Jurnalisme Masa Depan dalam Regulasi Media di Indonesia.....	139
<i>Mufti Nurlatifah</i>	
Etika Komunikasi, Ideologi Media, dan Regulasi	157
<i>Dr. Mulharnetti Syas</i>	
Analisis Media Baru—Short Message Service Berdasarkan Etika Periklanan Indonesia 2007	170
<i>Leonita K. Syarief, S.Sos.</i>	

BAGIAN 4: NEW MEDIA, KOMUNIKASI POLITIK, DAN PERUBAHAN SOSIAL

Media Baru: Isu dan Kendala bagi Demokrasi di Indonesia.....	182
<i>Agus Triyono</i>	
New Media and Political Communication (Indonesia Case)	193
<i>Reuben Reynold Sihite</i>	
Media Baru dan Gerakan Sosial: Suatu Tinjauan Sosiologis	201
<i>Morissan, M.A.</i>	
Fenomena Popularitas Video Unggahan di YouTube dan Budaya Media Baru.....	208
<i>Wahyutama, M.Si.</i>	

BAGIAN 5: RISET KOMUNIKASI DAN ASPEK "TEORI TIMUR" DALAM ILMU KOMUNIKASI

Meta-Research dan Dimensi Epistemologi Komunikasi Konvergensi....	224
<i>Dr. Atwar Bajari, M.Si.</i>	
Media Baru: Peluang dan Modifikasi Teori Komunikasi	235
<i>Dr. Endah Murwani</i>	

Menggagas Metodologi Penelitian Komunikasi New Media:

Tantangan Masa Depan Riset Komunikasi.....	247
<i>Yerry Panji Setianto, M.Si.</i>	

Ilmu Komunikasi dalam Konteks Ketimuran Mengapa Tidak.....	258
<i>Dr. Farid Hamid U., S.Sos., M.Si.</i>	

BAGIAN 6: MEDIA & PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK

Media dan Pembentukan Opini Publik: Benarkah Televisi Tersandera dan Media Lain Masih Independen	266
<i>Atmadji Sumarkidjo, M.M.</i>	
Peran KOMPAS.com sebagai Ruang Publik pada Pemberitaan RUUK Yogyakarta	291
<i>Ellen Miansky Yazak</i>	
Framing Analysis on the News of Indonesian Classified Document in Wikileaks Study on Raditional Media (KOMPAS Newspaper) and Online Media (www.detik.com)	305
<i>Alila Pramiyanti</i>	
Perubahan Media dalam Konstalasi Perubahan Sosial.....	322
<i>Dra. Kiki Zakiah, M.Si.</i>	
Media dan Pembentukan Opini Publik	336
<i>Adi Bajuri</i>	

BAGIAN 7: NEW MEDIA, NEW IDEA, DAN BERBAGAI DAMPAK SOSIALNYA

Semua Terekam Tak Pernah Mati(?): Media Baru sebagai Museum	352
<i>Ekky Imanjaya</i>	
Media Convergence and the Digital Dividé in Indonesia Media Sphere.....	371
<i>Ezmieralda Melissa</i>	
Ambient Media sebagai Media Ramah Lingkungan, Terobosan Kreatif Kampanye Pencegahan Pemanasan Global bagi Masyarakat Global.....	382
<i>Wegig Murwonugroho, S.Sn., M.Hum.</i>	
Impak Facebook pada Pola Komunikasi Sekolah Menengah Atas: Studi Kasus Fresta dan Kawan-kawan.....	394
<i>R. Masri Sareb Putra</i>	

BAGIAN 8: GENDER DAN FEMINISME

Bias Gender dalam Sinetron TV	406
<i>Endri Listiani, S.IP., M.Si.</i>	
Redefinisi Kesetaraan Gender dalam Ruang Konvergensi Komunikasi.....	423
<i>Yustikasari, S.Sos., M.I.Kom.</i>	
Representasi Perempuan sebagai Objek Seksualitas dalam Film.....	437
<i>Feni Fasta, S.E., M.Si.</i>	
<i>Christina Arsi, S.Ikom.</i>	

BAGIAN 9: CROSS CULTURAL COMMUNICATION DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Stereotype Construction among Indonesian Migrant Workers in Malaysia: Concept Intercultural Adaptation Studies	466
<i>Melly Ridaryanthi</i>	
News Gathering and the Quality of Cross-Cultural Understanding.....	479
<i>Susri Adeni</i>	
Tantangan Pengembangan Industri Majalah pada Era Digital	493
<i>Tri Diah Cahyowati, M.Si. & Morissan, M.A.</i>	
An Examination of Media Convergence and Its Implication on Mass Communication Notion.....	499
<i>Bintang Handayani, M.Si., M.B.A.</i>	

BAGIAN 10: KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN RAGAM ISU LAIN

Konstruksi Surat Kabar Harian Mengenai Lingkungan Hidup (Analisis Framing dalam Penyajian Berita Banjir Citarum SKH KOMPAS)	518
<i>Arief Fajar</i>	
Peran Majalah Wanita dalam Meningkatkan Kesadaran Akan Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia	533
<i>Eli Jamilah Mihadja, M.Si.</i>	
Analisis Framing sebagai Instrumen dalam Penanganan Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	540
<i>Wahyu Widiastuti, S.Sos., M.Sc.</i>	

Online Journalism dalam Ekonomi Politik Media	556
<i>Novi Erlita, S.Sos., M.A.</i>	
Perkembangan Alat Rekam & Media Penyimpanan pada Industri Televisi Saat Ini.....	565
<i>Andi Fahrudin</i>	

BAGIAN 11: MEDIA ONLINE, KONVERGENSI, DAN RAGAM MASALAHNYA

Konvergensi dan Konglomerasi Bisnis Media	588
<i>Astrie Krisnawati, S.Sos., M.Si.</i>	
Revolusi 2.0, Media Sosial Internet dalam Pergolakan Komunikasi Politik	603
<i>Fajar Junaedi, M.Si.</i>	
Proses Pembangunan Stakeholder Equity dalam Perspektif System-Centric di Era Konvergensi Media	612
<i>Helpris Estaswara</i>	
E-Commerce dan Tingkat Kepercayaan Konsumen: Studi tentang Faktor-faktor Penentu Kepercayaan Konsumen dalam Melakukan Transaksi Pembelian Melalui www.kaskus.us	633
<i>Reynaldo Harahap & Irwa R. Zarkasi</i>	
Kelisanan dalam Praktik Perbincangan Politik di Forum KASKUS	645
<i>S. Kunto Adi Wibowo</i>	

BAGIAN 12: KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN DAMPAK MEDIA

Makna Denotasi dan Konotasi Dialog Antar-Umat Agama pada Film Cin(T)a	662
<i>Fiona Suwana</i>	
Terpaan Media Massa Terhadap Pemberian Nama Anak (Studi Kasus di Kota Serang Tahun 2010)	683
<i>R. Nia Kania Kurniawati, S.IP., M.Si.</i>	
The Inhibiting and Supporting Factor of Communication in Competence Based Curriculum Between Student and Teacher....	692
<i>Rita Destiwati, S.S., M.Si. & Junardi Harahap, S.Sos., M.Si.</i>	
Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi: Refleksi dan Masa Depan	704
<i>Setio Budi, H.H., M.Si.</i>	

ANALISIS FRAMING SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PENANGANAN KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Wahyu Widiastuti, S.Sos., M.Sc.¹

KONFLIK SUMBER DAYA ALAM

Konflik adalah sebuah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang berusaha untuk membatasi hak orang atau kelompok lain terhadap objek atau status yang diperebutkan (Wijardjo, 2001). Konflik terjadi di berbagai bidang kehidupan termasuk perebutan sumber daya alam seperti tanah, air, dan kawasan hutan. Menurut Upreti (2001), konflik terjadi manakala terdapat ketidaksepakatan di antara orang-orang yang memiliki pendapat, prinsip, dan perilaku terkait isu tertentu. Sementara itu Miall (2002) mengemukakan bahwa konflik bisa terjadi karena munculnya perbedaan kepentingan, nilai, dan keyakinan sebagai akibat adanya perubahan sosial.

Lecuwis (2006) menyebutkan lima penyebab konflik, yaitu adanya perbedaan nilai-nilai, norma, sumber daya dan perbedaan kepentingan, pengaruh dan kekuasaan, serta informasi. Sebuah konflik bisa terjadi karena lebih dari satu penyebab. Namun, sebab-sebab ini sering tidak jelas atau sulit dibedakan.

Nilai-nilai yang diyakini seseorang atau suatu kelompok memengaruhi bagaimana mereka melihat sesuatu dengan cara yang berlainan dengan orang atau kelompok lainnya. Perbedaan pandangan inilah yang melahirkan konflik. Misalnya, petani dan politisi yang memiliki pandangan berbeda mengenai konsep bertani, di mana petani memandang kegiatan pertanian sebagai "*way of life*" sedangkan politisi menggolongkannya dalam kelompok "pekerjaan". Mereka yang memiliki nilai-nilai yang sama tetap memiliki potensi berkonflik, karena mereka bisa saja tidak sepakat mengenai aturan-aturan dan penerapannya. Hal inilah yang memicu munculnya konflik karena perbedaan norma-norma. Di sini orang-orang tidak sepakat mengenai hukum dan aturan mana yang harus ditegakkan untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini sering kali mencakup pertentangan dalam memperebutkan akses dan pemanfaatan sumber daya yang terbatas seperti air, tanah, dan kawasan hutan. Sumber daya lain yang sering dipertentangkan kelompok-kelompok

dalam masyarakat adalah kepemilikan kekuasaan dan pengaruh atas kelompok lain. Mereka berselisih mengenai posisi kepemimpinan formal dan pengaruhnya dalam konteks tertentu. Informasi yang diterima orang-orang dalam masyarakat juga melahirkan konflik, karena adanya ketidaksepakatan mengenai mana yang dianggap "benar" atau "tidak benar". Informasi sering menjadi 'senjata' ketika orang-orang berkonflik.

Widjarjo (2001) mengelompokkan konflik menjadi tiga kategori, yaitu konflik terpendam, muncul ke permukaan, dan terbuka. Konflik terpendam mulai tumbuh saat ada tekanan yang tidak kelihatan dan belum berkembang. Pada derajat tertentu pelaku konflik tidak menyadari kondisi ini. Pada muncul ke permukaan konflik, pelaku konflik sudah dapat mengidentifikasi dan mengakui adanya ketidaksepahaman akan suatu isu, namun mereka belum mulai melakukan negosiasi untuk membahas dan menyelesaikannya. Adapun pada konflik terbuka, para pelaku telah berusaha bernegosiasi namun belum menghasilkan kesepakatan.

Konflik sumber daya alam umumnya disebabkan oleh empat alasan. *Pertama*, karena sumber daya alam merupakan *interconnected space*, yang artinya perilaku seseorang atau kelompok akan memengaruhi orang atau kelompok lain. *Kedua*, sumber daya alam juga merupakan *social space* yang membentuk hubungan tertentu di antara pemangku kepentingan. Alasan selanjutnya adalah sifat sumber daya alam yang bisa habis karena perubahan lingkungan yang cepat, kebutuhan yang tidak terbatas serta distribusi yang tidak merata. Adapun alasan yang terakhir adalah sumber daya alam dianggap memiliki makna simbolis pada kelompok-kelompok tertentu (Upreti, 2001).

Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali muncul saat pemangku kepentingan, pengguna dan pengatur sumber daya alam memiliki perspektif yang berbeda mengenai bagaimana sumber daya alam tersebut harus diatur dan dimanfaatkan. Konflik juga muncul saat suatu kelompok disingkirkan atau tidak dilibatkan dalam proyek, program, dan *policy*, sehingga kelompok tersebut merasa iri. Beberapa alasan mengapa sebuah kelompok tidak dilibatkan dalam proyek, program, dan *policy* dijelaskan oleh FAO (2002) sebagai berikut:

- Pembuatan kebijakan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal.
- Kurangnya harmoni dan koordinasi antara badan hukum dan dan pelaksananya.
- Kurangnya identifikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan.
- Perencanaan yang kurang koordinasi.
- Lemahnya *information sharing*.
- Terbatasnya kapasitas institusional.

¹ Penulis adalah Pengajar Dept. Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu.

- Program *monitoring* dan evaluasi yang tidak tepat.
- Kurang efektifnya mekanisme manajemen konflik.

Konflik atas sumber daya alam yang tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, mengacaukan program dan *project*, serta merusak penghidupan masyarakat. Secara umum, Aarts & Woerkum (2002) melihat bahwa mengenali hubungan antar-aktor dalam konflik merupakan salah satu usaha untuk memecahkan permasalahan sumber daya alam. Dalam situasi seperti ini perlu dilakukan negosiasi untuk mendefinisikan permasalahan serta mencari solusinya. Oleh karena itu, proses penyelesaian konflik membutuhkan pemahaman serta *re-framing* terhadap aktor yang terlibat.

Temuan penelitian mengenai analisis konflik kehutanan di Indonesia yang dilakukan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) dari tahun 1997 hingga 2003 menunjukkan, bahwa ketegangan atau konflik umumnya disebabkan karena perbedaan persepsi di antara para pemangku kepentingan mengenai batas-batas wilayah hutan, hak pemanfaatan hutan, pembayaran kompensasi, serta distribusi hasil hutan. Sementara itu, Pinkley (1994) menjabarkan bahwa konflik terjadi karena perbedaan pengalaman dan *frame* dari tiap aktor.

Sebagai upaya mengurangi dampak negatif dari adanya konflik dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, studi CIFOR merekomendasikan bahwa: (i) manajemen konflik seharusnya diperhatikan dalam pengelolaan kehutanan; (ii) konflik kehutanan seharusnya dipantau dan dipelajari penyebab, akibat yang ditimbulkan, dan cara penyelesaiannya; serta (iii) lebih mengembangkan metode alternatif untuk penanganan konflik.

Penelitian mengenai *frame* para pemangku kepentingan yang bertentangan merupakan bagian dari manajemen konflik. Dengan menggunakan analisis *framing* mediator dan fasilitator diharapkan bisa mengenali *frame* para pelaku konflik, sehingga mempermudah melakukan intervensi terhadap konflik tersebut (Shmuelli, 2006).

Selain analisis *framing*, Upreti (2001) menyarankan bahwa dalam memahami konflik perlu memerhatikan masalah pelaku konflik dan *pluralism* hukum yang mereka pakai. Dalam menyuarakan tuntutan mereka yang terlibat dalam konflik diatur oleh hukum formal, hukum adat, kebiasaan, dan kepercayaan serta aturan-aturan lokal. Satu peraturan dalam konteks tertentu mungkin lebih kuat dibanding dengan aturan yang lain. Aturan yang akan dipakai tergantung pada kepentingan, pengetahuan lokal, konteks interaksi, dan relasi kekuasaan (Spiertz dalam Meinzen-Dik dan Pradhan, 2002)

ANALISIS FRAMING

Frame adalah proses membentuk dan menyatakan interpretasi kita mengenai dunia sebagai upaya untuk mempermudah memahami sebuah situasi (Gray, 2003). Aktivitas *framing* meliputi memilah, mengkategorikan, memfokuskan, dan menyusun pengalaman-pengalaman yang baru dan membandingkannya dengan interpretasi yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari kegiatan *framing* adalah mendefinisikan masalah, mendiagnosis sebab-sebabnya, membuat penilaian moral dan menyarankan penyelesaian masalah tersebut. Melalui *frame* kita bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab suatu masalah, kerugian dan manfaatnya, memperhitungkan nilai-nilainya, mengidentifikasi kekuatan yang menyebabkan munculnya masalah, mengevaluasi penyebab dan pengaruhnya serta menawarkan *treatment* beserta konsekuensinya.

Sementara itu, Shmuelli (2006) melihat *frame* sebagai upaya memahami sebuah peristiwa dan sebagai sebuah strategi komunikasi. *Frame* sebagai upaya memahami peristiwa yang kompleks menunjukkan bahwa *frame* memiliki perlengkapan kognitif. Di sisi lain, *frame* digunakan untuk memberi makna dan menginterpretasi aspek pada sebuah situasi serta mengomunikasikannya pada yang lain. Struktur kognitif ini membantu mereduksi informasi yang berlebihan dan berperan sebagai model realitas. *Frame* juga menyusun fenomena secara koheren, memahami kategori, memberi definisi atas sebagian aspek yang diamati dan mengesampingkan hal yang kurang relevan. Jadi, *frame* mirip dengan persepsi dan bidang pandang seseorang (*the field of vision*). Dari perspektif komunikasi, *framing* merupakan strategi yang bertujuan untuk mempersuasi orang lain dan memenangkan negosiasi. Para pelaku konflik umumnya membentuk *frame* yang sesuai dengan kepentingan mereka. Saat seseorang diminta untuk menjelaskan sebuah konflik, mereka akan memilih terminologi yang mendukung posisinya.

Tannen dan Wallat dalam Dewult (2005) memilah *frame* dalam dua skema, yaitu *knowledge* dan *interactive* sebagai varian pendekatan dalam manajemen konflik. *Frames* sebagai *knowledge schema* merujuk pada struktur ekspektasi mengenai orang-orang, objek, dan *setting* peristiwa. Sementara *interactive schema* merujuk pada batasan-batasan yang dinegosiasikan dalam interaksi tertentu dan fokus pada bagaimana melalui komunikasi didefinisikan aspek-aspek penting yang terjadi dalam interaksi. *Frame* yang fokus pada struktur *knowledge* disebut dengan *cognitive representation*, sedangkan yang fokus pada struktur *interactive* disebut dengan *interactional co-construction*.

Cognitive representation mengasumsikan bahwa konflik itu tidak berada di

luar, tetapi di dalam pikiran seseorang karena cara seseorang mengalami, menginterpretasi, memproses, dan mempresentasikan isu, hubungan dan interaksi antarpelaku itulah yang membentuk konflik. Jadi, konflik adalah *state of mind*. Tversky dan Kahneman (dalam Dewulf *et al.*, 2005) melihat *frame* sebagai *cognitive heuristic* yang digunakan untuk menginterpretasi situasi. *Frame* didefinisikan sebagai konsep perilaku, hasil dan konsekuensi tindakan. *Cognitive frame* merupakan struktur memori yang membantu menyusun dan menginterpretasi informasi dengan cara mencocokkannya dengan kategori yang telah ada sebelumnya. *Frame* adalah representasi kognitif pengetahuan yang disimpan dan kemudian dipakai dan diterapkan pada informasi baru. *Block cognitive* pada tabel Dewulf memfokuskan pada struktur ekspektasi pelaku terkait dengan isu, relasi, dan interaksi.

Sementara itu, pendekatan *interactional co-construction* terkonsentrasi pada batas-batas yang dinegosiasikan dalam interaksi atau menggarisbawahi bagaimana *frame* diproduksi dan dinegosiasikan dalam interaksi melalui metakomunikasi. Pendekatan *interactional co-construction* berupaya mencari batasan-batasan mengenai isu, relasi dan interaksi yang dinegosiasikan dalam percakapan. Jadi fokusnya adalah bagaimana partisipan mencoba memengaruhi pendefinisian isu, relasi, dan interaksi melalui metakomunikasi.

Objek *frame* adalah isu, hubungan, dan interaksi. *Frame* isu merujuk pada makna sebuah peristiwa, situasi atau masalah yang dipresentasikan secara kognitif atau di-*co-construction* secara interaksional. *Frame* hubungan atau *frame* identitas dan relasi merujuk pada pemaknaan diri sendiri dan pihak lain serta relasi dengan pihak lain dalam konflik. Sementara itu, *frame* interaksi merujuk pada pemaknaan aktivitas interaksi yang dianggap sebagai proses yang terus-menerus antara mereka yang terlibat dalam konflik.

Dewulf (2005) memformulasikan *framing* berdasarkan dua pendekatan yang berbeda, yaitu *framing distinction* (*cognitive approach*, *interactional approach*) and *knowledge schemas*, *relationship schemas*, *interaction schemas*. Kombinasi dua pendekatan tersebut menghasilkan sebuah *mapping block* dengan enam *block framing*, yaitu *knowledge schemas*, *relationship schemas*, *interaction schemas*, *issue framing*, *relationship framing*, dan *interaction framing* (lihat Tabel 1).

Knowledge schema merupakan representasi kognitif yang tersimpan dalam memori, yang kemudian diambil kembali dan diterapkan pada situasi baru. Hal ini mencakup keseluruhan ekspektasi mengenai apa yang bisa terjadi dan apa yang bisa dilakukan apabila kejadian tertentu terjadi atau tidak terjadi (Dewulf, 2005). *Gain versus loss frames* dan *risk frames* sesuai apabila diterapkan dalam pendekatan ini. *Gain versus Loss Frames* merupakan perspektif mengenai apakah tindakan yang di-

ambil oleh suatu pihak lain merugikan atau menguntungkan pihak lain (Gray, 2003). Adapun *risk frames* merefleksikan bagaimana individu menyusun informasi mengenai apakah sebuah situasi aman atau tidak bagi dirinya. Aktor umumnya berusaha menekan risiko sekecil mungkin agar tidak merugikan diri mereka.

TABEL 1 Mapping Blocks of Framing

The nature of frame	What is it that gets framed?		
	Knowledge	Relationship	Interaction
<i>Cognitive blocks</i> Structures of expectation	(1) Knowledge Schemas Structure of expectation with respect to substantive - Gain versus loss frames - Risk frames	(2) Relationship Schemas Structure of expectation with respect to self, others and relationship - Identity frame - Characterization frame - Power - Trust	(3) Interaction Schemas Structure of expectation with respect to interaction - Conflict management
<i>Interactional approach</i> Alignments negotiated in interaction	(4) Issue framing Interactive production of the meaning of issues - Gain versus loss frames - Risk frames	(5) Relationship framing Interactive production of the meaning of self, other and relationships - Identity frame - Characterization frame - Power - Trust	(6) Interaction framing Interactive production of the meaning of ongoing interaction - Conflict management

Sumber: Dewulf (2005).

Relationship schemas merupakan skema mengenai diri sendiri, orang lain, dan relasi di antaranya. Skema ini memiliki empat tipe, yaitu *frame identity*, *characterization*, *power* dan *trust*. *Identity frame* adalah *frame* yang dikonstruksi oleh pelaku konflik mengenai diri mereka. Adapun *frame* mengenai pihak lain dinamakan dengan *characterization frame*. *Frame* ini biasanya berupa *stereotype*. Seorang individu juga melakukan *frame* terkait hubungan atau relasinya dengan pelaku lain dalam *relationship frame*.

Menurut Rothman (dalam Shmueli 2006), aktor mengidentifikasi diri mereka berdasarkan interaksi antara konsep diri dan kepentingan serta afiliasi kelompoknya. *Identity frames* merujuk pada perspektif 'siapa saya'. Bagaimana menjawab pertanyaan tersebut tergantung pada keanggotaan mereka dalam kelompok sosial, karena karakteristik kelompok memengaruhi bagaimana individu mendefinisikan dirinya.

Characterization frames merupakan cara sederhana mengidentifikasi karakter pihak yang lain dalam konflik dan menggolongkan individu atau kelompok lain dalam kelompok yang positif atau negatif berdasarkan apa yang telah mereka laku-

kan. *Characterization frame* mencakup struktur ekspektasi mengenai bagaimana sikap dan perilaku pihak lain dan bagaimana mereka seharusnya.

Power frames adalah skema hubungan mengenai status atau bagaimana seseorang menganggap dirinya superior atau inferior terhadap pihak lain. Seperti halnya *identity frame*, *power frame* juga menyebabkan konflik yang sulit dikendalikan. Dalam *trust frames*, individu memberi label pihak lain sebagai "bisa dipercaya" atau "tidak bisa dipercaya". Kepercayaan individu terhadap pihak lain merupakan elemen penting dalam membangun hubungan dengan orang lain.

Interaction schema merujuk pada makna *cognitive representation* atau *interactionally co-constructed* mengenai aktivitas dalam interaksi, proses yang berkembang sepanjang waktu di antara orang-orang yang terlibat dalam konflik. Skema ini merupakan struktur ekspektasi terhadap interaksi yang membantu individu berfungsi dalam interaksi sosial yang beragam.

Konflik yang rumit sering melekat dalam usaha memunculkan institusi atau prosedur pengambilan keputusan. Konsep kekuasaan, kontrol sosial, dan manajemen konflik menurut pelaku konflik sangat penting dalam dinamika konflik. Ini merupakan penilaian mereka yang selanjutnya membentuk kekuasaan yang sah dan akan mendukung posisinya. *Conflict management frames* mencakup akomodasi keinginan para pelaku konflik dalam mengatur dan mengendalikan konflik.

Interaction Approach menekankan bagaimana *frame* dihasilkan dan dinegosiasikan selama interaksi melalui meta-komunikasi. Pendekatan ini mencari batasan-batasan mengenai isu, relasi, dan interaksi yang dinegosiasikan selama konflik berlangsung. Fokus utama pendekatan ini adalah bagaimana individu atau kelompok berusaha memengaruhi pendefinisian isu, relasi, dan interaksi yang melalui meta-komunikasi.

Frame isu dalam pendekatan ini menggarisbawahi bagaimana para pelaku konflik mendefinisikan makna suatu isu, membangun dan menegosiasikannya dalam interaksi sosial. *Frame* relasi fokus pada bagaimana peserta konflik mendefinisikan dan menegosiasikan relasi dalam kategori submisif-dominan, dependen-independen, suka-tidak suka dan terbuka-tertutup. Relasi melekat dalam percakapan secara verbal dan nonverbal. *Frame* interaksi merujuk pada bagaimana pelaku konflik mendefinisikan, membangun, dan memaknai interaksi dan proses interaksi itu sendiri. *Frame* interaksi sangat dinamis karena aktor mengkonstruksinya secara terus-menerus dengan cara saling bereaksi terhadap *frame* yang dibentuk oleh pihak lain.

Frame bisa dibentuk melalui beberapa cara dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Aktor umumnya tidak melakukan *frame* sebelum terjadinya interaksi. Seseorang melakukan *frame* selama proses interaksi dengan cara mengintegrasikan

beberapa tujuan dalam suatu percakapan. Selama proses interaksi orang akan menggabungkan pengalaman masa lalu, tujuan, dan ekspektasi serta konteks di mana interaksi berlangsung.

Aspek penting lain dalam interaksi antara para pelaku konflik adalah *reframing*. *Reframing* muncul saat pelaku mengubah *frame* mereka atau membangun perspektif baru mengenai isu atau pelaku lain dalam konflik. Perubahan ini terjadi melalui intervensi dan perilaku terencana pada saat yang tepat. Suatu *frame* bisa berubah atau tidak tergantung pada kemampuan seorang aktor dalam mengenali, memahami, menimbang perspektif pihak lain dan selanjutnya memilih mana yang dianggap paling tepat. *Reframing* tidak bisa terjadi pada pihak yang menganggap bahwa perspektif mereka adalah yang paling benar untuk memahami konflik yang terjadi (Gray, 2003).

Secara umum, pemecahan masalah yang kompleks membutuhkan pemahaman akan adanya saling ketergantungan antara semua pihak yang terlibat. Dalam situasi seperti ini, diperlukan negosiasi mengenai pendefinisian masalah dan upaya penyelesaiannya. Oleh karena itu, proses penyelesaian konflik membutuhkan *reframing* oleh semua aktor yang berkepentingan (Gray dalam Lewicki, 2003). Dengan *reframing*, pelaku konflik bisa menghasilkan solusi yang konstruktif, meskipun tidak menjamin bahwa konflik akan segera dapat diselesaikan (Gray, 2003).

Konflik merupakan proses yang sangat dinamis (Elliot et al., 2003). Pada konflik yang sangat rumit, perubahan aktor, konteks, dan wilayah konflik mungkin tidak memengaruhi resolusi konflik, namun perubahan *frame* bisa membuat konflik lebih mudah dikendalikan. Jadi, *framing* dapat menyebabkan konflik dan membuat konflik terus berlangsung bila terdapat interpretasi pelaku yang berbeda, dan perbedaan ini tidak dikomunikasikan dalam dialog. Dengan mengesampingkan perubahan kondisi eksternal, bagaimana pelaku konflik memahami isu dan pihak lain yang terlibat dalam konflik bisa memengaruhi kerumitan konflik tersebut. Apabila pelaku merasa interpretasi mereka adalah yang paling benar, maka mereka tidak bersedia mengubah *frame* sehingga keadaan ini akan memicu dinamika konflik.

Perbedaan *frame* pelaku konflik mengakibatkan pemecahan konflik semakin rumit. Dalam konflik sumber daya alam, perbedaan opini mengenai siapa yang mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan ambiguitas dalam sistem sosial bisa menyebabkan konflik dan menghambat resolusinya. Menurut Elliot et al., dalam beberapa kasus, *frame* pelaku konflik bisa berubah melalui intervensi di saat yang tepat.

Saat melakukan negosiasi, pelaku konflik umumnya menghadapi berbagai ketidakpastian (*uncertainty*), seperti: (i) ketidakpastian terkait dengan hasil negosiasi;

(ii) ketidakpastian terkait dengan interaksi antara pelaku; dan (iii) ketidakpastian terkait dengan proses pembelajaran. Pelaku konflik umumnya bertahan dengan tujuan masing-masing dan menghindari adanya negosiasi, karena negosiasi memiliki risiko tujuan yang mereka inginkan bisa tidak terpenuhi (Aarts and Van Woerkum, 2002).

Dalam negosiasi, orang juga sering menghadapi masalah saat meramalkan respons pihak lain. Mereka menginginkan respons pihak lain tersebut sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Orang cenderung takut dipermalukan sehingga selalu memiliki perasaan negatif. Ketidakpastian dalam negosiasi lainnya adalah kekhawatiran akan adanya status *quo*. Status *quo* umumnya melawan fakta-fakta baru yang dianggap mengancam keberadaan mereka.

Ada dua strategi terkait dengan masalah ketidakpastian dalam negosiasi; yaitu strategi mengindar dan menghadapi ketidakpastian. Kepastian (*Certainty*) dibangun dengan informasi yang sangat terbatas dan tanpa komunikasi yang tegas. Jadi, untuk menciptakan kesan *certain* dalam situasi yang ketidakpastian, orang cenderung memilih, merekonstruksi, atau mengabaikan informasi dengan cara mengekspresikan stigma atau *stereotype* mengenai pihak lain. Dengan memberi label *stereotype*, mereka memilah para pelaku konflik dalam kelompok '*the bad*' dan '*the good*' (Aarts and Van Woerkum, 2002).

Untuk menghindari ketidakpastian, orang cenderung mengubah identitas mereka atau mempresentasikan diri mereka secara berbeda tergantung situasi yang mereka hadapi. Orang juga cenderung menghindari ketidakpastian dengan menghindari tanggung jawab. Apabila pelaku saling menyalahkan untuk menghindari tanggung jawab, maka solusi terhadap masalah tidak akan bisa didapatkan. Strategi menghindari ketidakpastian ini mengarah pada negosiasi distributif dan menghambat proses *reframing* yang diperlukan untuk menghasilkan resolusi (Aarts and Van Woerkum, 2002).

Salah satu strategi untuk menghadapi ketidakpastian dalam negosiasi adalah dengan menghadirkan orang-orang yang *open minded*, yang bersedia bertindak sebagai agen perubahan dalam organisasinya maupun organisasi di luarnya. Orang yang *open-minded* cenderung membuka diri untuk melakukan proses *reframing* yang diperlukan dalam resolusi konflik, karena mereka cenderung menghargai pandangan pihak lain.

MEMAHAMI PERSPEKTIF PELAKU KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM-STUDI ANALISIS FRAMING PADA CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR BENGKULU

Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDB) yang berada di Provinsi Bengkulu merupakan satu dari 33 kawasan konservasi nasional. Dengan luas 577 ha, kawasan ini berada di dua wilayah administratif, yaitu Kota Bengkulu (536,50 ha) dan kabupaten Bengkulu Utara (40,5 ha). Cagar alam ini meliputi 487 ha hutan dan rawa serta 90 ha lahan basah. Danau Dendam Tidak Sudah (DDTS) yang merupakan bendungan buatan zaman penjajahan Belanda berada di kawasan lahan basah CADDB.

Danau Dendam tidak sudah memiliki peran yang sangat penting bagi ekosistem sebagai sumber air dan indikator intrusi air laut. Sementara itu, daerah rawa di sekitarnya berfungsi sebagai daerah resapan air dan habitat bagi berbagai satwa dan tanaman langka. Anggrek *endemic vanda hookeriana* yang ditetapkan sebagai ikon CADDB juga tumbuh di daerah ini. Pengelolaan CADDB saat ini merupakan kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu yang secara struktural berada di bawah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Beberapa konflik muncul di kawasan CADDB dalam 20 tahun terakhir, di antaranya dibuatnya kawasan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) dan pembangunan jalan yang melintasi kawasan hutan lindung, penjarahan lahan oleh oknum pejabat dan masyarakat sekitar cagar alam, serta pembangunan perumahan di kawasan resapan air (harian *Rakyat Bengkulu*, 2007; Walhi 2007; Yayasan Lembak Blogspot, 2008). Pembangunan vila di kawasan CADDB merupakan isu terbaru yang muncul dalam pengelolaan CADDB. Menurut rumor yang beredar, vila yang dirancang untuk kepentingan pariwisata ini dimiliki Agusrin Najamudin, Gubernur Bengkulu.

Isu mengenai potensi pariwisata di CADDB bisa ditarik mundur sejak tahun 2001, sewaktu Gubernur Bengkulu mengajukan izin pada Kementerian Kehutanan untuk mengubah status cagar alam menjadi kawasan wisata alam. Meski permintaan ini ditolak, namun pemerintah daerah tidak putus asa. Tahun 2005, Walikota Bengkulu kembali mengajukan proposal untuk tujuan yang sama, namun BKSDA tetap dengan keputusan awalnya (Darwis Siahaan, per.comm, 2008).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam menilai pembangunan vila adalah ilegal, karena bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 yang melarang pendirian bangunan permanen dalam radius 500 meter dari kawasan cagar alam. Adapun lokasi pembangunan vila yang menurut rumor akan dijadikan hotel wisata itu tepat di sisi danau. Sementara itu pihak pemilik vila tidak pernah mengajukan izin pembangun-

an kepada Kelurahan Dusun Besar dan Dinas Tata Kota Bengkulu (harian *Rakyat Bengkulu*, 2008).

Para petani yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan CADDB, serta komunitas suku Lembak yang tinggal di sekitar lokasi menolak keberadaan vila yang rencananya akan dibangun di lahan seluas seperempat hektar ini. Kedua kelompok ini menilai pembangunan vila akan memperburuk kondisi lingkungan CADDB, yang pada akhirnya akan memengaruhi penghidupan para petani. Penolakan ini didukung oleh Walhi dan Yayasan Ulayat yang mempunyai kepentingan di bidang lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai konflik pembangunan vila di kawasan CADDB, dengan cara menggali persepsi para pelaku konflik mengenai isu, relasi, dan interaksi di antara mereka. Lebih lanjut, penelitian ini secara mendalam ingin mengetahui keuntungan dan kerugian pembangunan vila, dan bagaimana *frame* pemangku kepentingan terkait isu ini (*cost and benefit frame*, *risk frame*); bagaimana pemangku kepentingan membuat penilaian mengenai diri sendiri (*identity frame*) dan pihak lain (*characterization frame*), posisi mereka dalam konflik (*power frame*) serta apakah mereka percaya atau tidak percaya pada pihak lain (*trust frame*); serta bagaimana seharusnya menghadapi dan menyelesaikan konflik CADDB (*conflict management frame*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis yang mengasumsikan bahwa konflik sebaiknya diintervensi dengan menggunakan analisis *framing*, karena analisis ini membantu fasilitator dan mediator untuk mengidentifikasi *frame* para pelaku konflik. Dengan menemukan *frame*, mediator dan fasilitator akan mudah mengetahui beberapa aspek seperti penyebab, keuntungan dan kerugian, hubungan antar-pelaku dan bagaimana konflik harus dihadapi. Analisis ini dilakukan dengan cara menggali pengalaman masa lalu dan ekspektasinya terhadap konflik.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu-individu dari berbagai kelompok yang terkait dengan isu CADDB. Pemilihan perwakilan kelompok membutuhkan perhatian, sehingga akan diperoleh representasi kelompok yang memiliki kredibilitas dan dipercaya kelompoknya. Mengingat isu pembangunan vila di kawasan CADDB memiliki sejarah konflik yang panjang, maka representatif kelompok tersebut harus memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai konflik tersebut (Leeuwis, 2006).

Responden	Status Responden
Aparat Pemerintah	Staf Kantor BKSDA
	Staf Kantor Dinas Pariwisata
	Staf Kantor Bappeda
	Staf Kantor Kepala Desa

lanjutan ...

NGO	Walhi
	Yayasan Ulayat
	Yayasan Lembak
Masyarakat	Ketua Adat
	Nelayan
	Pemilik Kios DDTS
	Petani

Interviu antara peneliti dengan masing-masing pemangku kepentingan dimaksudkan untuk menggali perspektif mereka mengenai pembangunan vila dan manajemen CADDB secara umum. Tiga buah pertanyaan yang diajukan yaitu mengenai keuntungan dan kerugian pembangunan vila, pandangan tiap aktor mengenai diri mereka dan bagaimana mereka memandang aktor lain, solusi bagi konflik sumber daya alam serta manajemen pengelolaan CADDB.

- Keuntungan dan kerugian pembangunan vila di area CADD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan CADDB, hanya polisi hutan dari satuan BKSDA yang mengetahui siapa pemilik vila yang pembangunannya telah dimulai sejak Desember 2007 ini. Aktor lainnya hanya menduga bahwa pemiliknya adalah pejabat pemerintahan atau orang-orang dekatnya, karena banyak persyaratan pembangunan yang tidak dipenuhi, misalnya izin dari Dinas Tata Kota Bengkulu, BKSDA, Kelurahan Dusun Besar, maupun masyarakat sekitar. Pembangunan vila yang kabarnya direncanakan sebagai hotel ini menimbulkan pro dan kontra bagi para pemangku kepentingan. Petani, Walhi, ketua adat Lembak, dan Yayasan Ulayat, BKSDA serta dinas tata kota menolak pendirian vila di kawasan CADDB, karena mereka menganggap bahwa aktivitas pembangunan vila akan menghasilkan dampak negatif, baik terhadap lingkungan CADDB maupun sumber mata pencaharian mereka yang secara langsung tergantung pada keberadaan CADDB. Namun, ada beberapa warga terutama yang tidak memiliki pekerjaan tetap, menganggap pembangunan vila berarti peluang untuk meningkatkan pendapatan. Apabila kawasan CADDB ramai dengan aktivitas pariwisata, maka secara langsung maupun tidak langsung masyarakat sekitar bisa menikmati hasilnya.

- Penilaian pemangku kepentingan terhadap diri sendiri dan kelompok lain.
- BKSDA, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Petugas Pengairan (di bawah Dinas Pekerjaan Umum), serta Dinas Tata Kota mempunyai landasan formal terkait dengan kepentingan mereka terhadap isu pembangunan vila. Yayasan Ulayat, Walhi, dan Yayasan Lembak menyebutkan bahwa interest mereka berbasis tanggung jawab

akan perlindungan keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai tambahan, Yayasan Lembak juga mempunyai ikatan dengan CADDB secara historis, yaitu bahwa nenek moyang masyarakat suku Lembak adalah penghuni asli daerah Dusun Besar sejak puluhan tahun yang lalu. Sementara itu, para petani terikat dengan CADDB karena mereka menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air danau.

Dalam wawancara ini terungkap bagaimana masing-masing kelompok saling menyalahkan atas pembangunan vila tersebut. Masyarakat Lembak dan organisasi berbasis lingkungan (Walhi dan Yayasan Ulayat) menyalahkan Dinas Tata Kota dan BKSDA yang dituduh memberi izin kepada pemilik vila untuk memulai pembangunan. Sementara itu, kedua dinas ini menolak tuduhan masyarakat Lembak serta menilai pejabat pemerintahan sebagai pihak yang menyalahgunakan kekuasaan yang menyebabkan munculnya konflik ini.

- Solusi bagi konflik dan pengelolaan CADDB.

Mereka yang menganggap pembangunan vila dapat menimbulkan dampak negatif mendesak dihentikannya aktivitas tersebut. Mereka mengatakan bahwa BKSDA yang seharusnya mengambil tindakan, karena mempunyai otoritas. Lebih lanjut, para pemangku kepentingan ingin dilibatkan dalam pengelolaan CADDB sehingga kepentingan mereka juga turut diperhatikan.

FOCUSED GROUP DISCUSSION

FGD diselenggarakan dalam dua sesi. Pertama presentasi dari masing-masing kelompok kepentingan, dan selanjutnya diskusi antarmereka yang dipandu oleh moderator. Pada sesi pertama, mereka mempresentasikan pandangan mengenai isu pembangunan vila dan kemungkinan solusinya. Pada sesi ini banyak informasi baru yang muncul yang tidak diungkapkan oleh narasumber pada sesi *single interview*. Pada umumnya, mereka setuju untuk menyelesaikan masalah yang ada secara damai tanpa tindakan anarkis.

Pada sesi kedua, yaitu sesi diskusi ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Peserta FGD memberikan justifikasi pada semua langkah yang mereka ambil terkait isu yang ternyata bisa dimaklumi oleh kelompok lain. Jika pada tahap *single interview* peserta FGD ini saling menyalahkan, maka pada sesi diskusi ini mereka menuding pihak yang kebetulan tidak hadir dalam acara FGD sebagai “musuh bersama” yang harus bertanggung jawab atas masalah upaya perusakan di kawasan cagar alam ini.

Berdasarkan analisis terhadap *single interview* kepada para pemangku kepentingan dan diskusi kelompok terfokus, maka dapat disimpulkan:

1. Issue frame

Sebagian besar aktor yang terlibat dalam konflik tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik vila dan peruntukannya, karena ketidakjelasan informasi. Namun, mereka meyakini bahwa pemiliknya adalah mereka yang mempunyai pengaruh besar, karena dianggap berani melanggar beberapa aturan terkait lokasi, perizinan, dan kemungkinan dampak pembangunan.

Mengenai dampak pembangunan vila, para pemangku kepentingan terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung dan menolaknya karena alasan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

2. Relationship frame

BKSDA, Dinas Tata Kota, Dinas Pertanian, dan Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi pemerintah, menggunakan *institutional-based identity* ketika menjelaskan pertanyaan ‘*who I am*’. Adapun Walhi dan Yayasan Ulayat menggunakan *interest-based identity*. Masyarakat lokal menyandang *place*, *social role*, dan *core identity*. Masing-masing pihak berupaya mempertahankan identitasnya dan tidak suka bila peran, kepentingan, dan kewenangannya dipertentangkan oleh pihak lain. Hal inilah yang membuat konflik semakin rumit.

Semua pelaku konflik mempunyai harapan pada pihak lain. Harapan ini dipengaruhi oleh pengalaman mereka sebelumnya, terutama saat pembangunan jalan yang melintasi cagar alam tahun 1990-1992 serta sebelum dan setelah reformasi. Masing-masing *stakeholders* menganggap perilaku mereka sendiri sebagai perilaku yang benar dan baik, dan lawannya berperilaku salah atau buruk. Pada *frame* ini mereka menggunakan alasan hak (alih-alih kepentingan). Pengatasnamaan hak juga memicu meningkatnya level konflik. *Relations frame* juga menunjukkan bahwa terdapat perasaan curiga satu sama lain serta ketimpangan kekuasaan antar-aktor yang memunculkan perasaan superior-inferior. Perasaan ini akan mengurangi ketergantungan antarmereka, dan pada akhirnya menghalangi keinginan untuk bernegosiasi.

Karena selama ini diabaikan, masyarakat lokal beserta pemimpinnya (formal/informal) mengimbau mereka dilibatkan dalam pengelolaan CADDB. Sementara itu, instansi pemerintah yang terkait dengan CADDB menginginkan kejelasan kerja sama dalam setiap ekologis dan historis. Hal ini kemudian juga diperparah oleh kurangnya koordinasi antarlembaga yang terkait dengan manajemen sumber daya alam.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Memahami *frame* pelaku konflik merupakan salah satu upaya dalam mengelola konflik, karena dengan mengetahui *frame* mengenai isu, relasi, dan interaksi maka akan diketahui penyebab, keuntungan dan kerugian, hubungan antarpe-laku konflik, sehingga pada akhirnya konflik semakin mudah dikendalikan.
2. Negosiator dan advisori dalam negosiasi perlu memberi ruang bagi masing-masing pihak untuk mengungkapkan perspektifnya, serta memahami dan menghargai latar belakang tindakan yang diambil pihak lain. Pemahaman dan penghargaan terhadap pihak lain membantu mengurai konflik sehingga bisa lebih mudah dikendalikan.
3. Mediator dan fasilitator dalam konflik perlu mengetahui dan menguasai analisis *framing*, karena dengan analisis ini membantu mereka memahami konflik dan mempermudah melakukan intervensi dalam penanganan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aarts, N. & C. van Woerkum. 2002. *Dealing with ketidakpastian in solving complex problems*. In: Leeuwis, C. & R. Pyburn. *Wheelbarrows full of frogs. Social learning in rural resource management*. Assen: Van Gorcum.
- Aarts, N. & C. van Woerkum. 2006. *Frame Construction in Interaction*. Wales: to appear in Gould, N. (ed.). *Engagement*. University of Glamorgan, Pontypridd.
- Dewulf, A., Gray, B., Putnam, L., Aarts, N., Lewicki, R., Bouwen, R., Van Woerkum, and C. June 2005. *Disentangling approaches to framing: mapping the terrain*. Sevilla: Paper, presented at JACM conference.
- Elliot, M., Gray, B., Lewicki, R. 2003. *Lesson Learned about the Framing and Reframing of Intractable Environmental Conflict*. In Lewicki, Gray and Elliot (eds.) 2003. *Making sense of Intractable Environmental Conflicts. Frames and Cases*. Washington: Island Press.
- Miall, Hugh et al. 2002. *Resolusi damai Konflik kontemporer: Menyelesaikan, mencegah, mengelola dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan ras*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pinkley, Robin L. 1994. *Conflict frames of reference: implications for dispute processes and outcomes*. *Academy of Management Journal*. Vol. 37, No. 1, pp. 193-205.
- Shmueli, Deborah, Elliott, Michael, Kaufman, Sandra. winter 2006. *Frame changes and management of intractable conflicts*. *Conflict Resolution Quarterly*, Vol. 24, No. 2, pp. 207-218

- McCharty, John. F. January 2002. *Between Adat and State: Institutional Arrangements on Sumatra's* Meinzen-Dick, Ruth S., Pradhan, Rajendra. *Legal Pluralism and Dynamic Property Rights*. Capri Working paper No. 22.
- Tannen, D. 1979. *What's in a frame? Surface evidence of underlying expectation*. *New direction in discourse process*. New Jersey: R. Freedle, Nordwood.
- Upreti, Bishnu Raj. 2001. *Conflict management in natural resources. A study of land, water and forest conflict in Nepal*. Wageningen: WAU.